

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Kajian Yuridis Hubungan Antara Hak Individu Untuk Melakukan Perjalanan Yang Melintasi Batas Wilayah Negara Dengan *Principle of National Sovereignty* Pada Era Globalisasi” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan antara kedaulatan nasional dan hak kebebasan pergerakan lintas batas individu, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 13 UDHR dan Pasal 12 ICCPR, adalah hal kompleks dalam konteks global saat ini. Kebebasan ini mencerminkan keinginan bawaan manusia untuk bepergian dan berkembang, yang juga dipengaruhi oleh globalisasi. Namun, ini bertentangan dengan inti kedaulatan nasional yang menuntut perlindungan negara. Menyeimbangkan hak individu dan prerogatif negara menjadi tantangan. Meski bepergian memajukan individu, negara juga harus mempertimbangkan stabilitas dan keamanan. Kerja sama global diperlukan untuk mengatasi tantangan lintas batas. Ini mengandalkan keseimbangan antara hak individu dan kedaulatan negara. Dalam dunia yang saling terkait, kerja sama penting untuk mengatasi isu transnasional. Mengakui hubungan ini membantu membentuk masa depan yang menghormati hak individu sambil menjaga stabilitas nasional.

2. Dalam era globalisasi, hubungan antara hak individu untuk bergerak lintas batas dan prinsip kedaulatan nasional menjadi kompleks dan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta regional. Dua pola berbeda muncul dalam dinamika ini, menghasilkan hasil yang bervariasi dalam penyesuaian mobilitas individu dengan kedaulatan negara. Di Amerika Serikat dan Amerika Selatan, implementasi hak kebebasan individu untuk bepergian cenderung disertai oleh konflik dan ketegangan karena upaya menyeimbangkan aspirasi individu dengan masalah keamanan nasional yang rumit. Di sisi lain, negara-negara ASEAN dan Uni Eropa menunjukkan integrasi yang lebih harmonis antara hak individu untuk bergerak dengan prinsip kedaulatan nasional melalui pendekatan kooperatif. Ini membuktikan potensi kolaborasi global dan regional untuk menciptakan lingkungan yang seimbang, menghormati hak individu tanpa mengorbankan integritas negara. Di tengah konflik dan kerja sama yang membedakan skenario, keselarasan yang harmonis ini menegaskan nilai diplomasi dan tujuan bersama untuk mencapai keseimbangan kolektif antara hak individu dan hak prerogatif negara. Keseimbangan ini harus dicapai melalui negosiasi bijaksana, dengan tujuan akhir menciptakan dunia di mana aspirasi individu dan kedaulatan negara hidup berdampingan secara harmonis dalam era globalisasi.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Hubungan antara hak kebebasan individu untuk berpergian lintas batas negara dan prinsip kedaulatan nasional dalam era globalisasi seharusnya dihadapi dengan keseimbangan yang bijaksana. Pada satu sisi, hak individu untuk mobilitas semakin diperluas oleh globalisasi, namun pada sisi yang lain, prinsip kedaulatan negara tetap penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Disarankan agar negara-negara dan difasilitasi oleh PBB bekerja sama dalam kerangka regional dan global untuk mencapai keselarasan ini. Implementasi kebijakan perjalanan haruslah berdasarkan pada transparansi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kolaboratif ini seharusnya membantu memastikan hak individu dihormati sekaligus menjaga integritas nasional.
2. Dalam menghadapi konflik dan keselarasan antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dan prinsip kedaulatan nasional dalam era globalisasi, solusi terletak pada negosiasi yang inklusif dan dialog yang berkelanjutan di mana negara-negara dapat berbagi keprihatinan, pengalaman, dan praktik terbaik terkait peraturan perjalanan. Diskusi ini dapat mengarah pada identifikasi tantangan bersama dan eksplorasi solusi yang seimbang. Konflik seharusnya diatasi dengan mengidentifikasi area kompromi di mana hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi

batas wilayah negara dapat diakui tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Pendekatan kooperatif antara negara-negara dan organisasi internasional akan memungkinkan penciptaan kerangka kerja yang seimbang dan adil. Penting untuk menghormati keanekaragaman budaya, nilai, dan kebutuhan nasional saat menjalankan kebijakan perjalanan. Melalui upaya yang memprioritaskan dialog dan kolaborasi, konflik dapat diatasi dan keselarasan antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dan prinsip kedaulatan nasional dapat tercapai, menciptakan lingkungan yang stabil dan inklusif di era globalisasi.